

BAB III

PEMBANGUNAN DAN PROBLEMATIKA KETIMPANGAN GENDER DI PAPUA

Pembangunan merupakan suatu fenomena yang tidak pernah habis untuk dibahas dalam kajian keberlangsungan hidup manusia. Fenomena ini selalu melekat sebagai salah satu ciri kehidupan manusia yang selalu mengalami perubahan. Konsep pembangunan selalu diidentikkan dengan kajian suatu perubahan atau sebuah pembaharuan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Menurut Rostow, pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam arti lurus, yakni di mana sebuah proses perubahan dari masyarakat yang terbelakang menuju ke masyarakat yang maju.⁴⁴ Pembangunan di sini diartikan sebagai bentuk perubahan yang direncanakan, yaitu sebuah perubahan dari masyarakat tradisionis menuju masyarakat modern, dengan tujuan ke arah yang lebih baik dan terarah untuk mencapai kemakmuran.

Di Indonesia sendiri, kata pembangunan sudah menjadi kata kunci bagi segala hal, yaitu sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat. Kemajuan yang dimaksud merupakan kemajuan material. Maka, pembangunan kerap kali diartikan sebagai kemajuan yang dicapai oleh masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi dengan tujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang merata.

Dalam perkembangan lebih lanjut, suatu proses pembangunan dapat dijadikan barometer atau tolak ukuran untuk menilai sejauh mana nilai-nilai dasar masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mengatasi berbagai permasalahan dalam dinamika masyarakat. Keanekaragaman etnik, agama dan ras di Indonesia, hal ini menjadikan kendala tersendiri yang dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan proses pembangunan. Bencana alam serta konflik yang masih sering terjadi, juga menjadi salah satu faktor atau hambatan mengapa masyarakat Indonesia mengalami kemunduran, terutama dalam pembangunan.

Papua merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi fokus pemerintah dalam membangun, baik dari segi ekonomi, sosial yang meliputi pendidikan dan kesehatan, bidang politik serta pembangunan dalam sumber daya manusia sendiri. Kondisi Papua yang masih sangat rentan akan permasalahan, ini menjadikan faktor utama kemunduran yang di alami oleh masyarakat Papua hampir di semua bidang dalam pembangunan.

A. Kondisi dan Pembangunan Papua

Papua merupakan salah satu provinsi di kawasan Indonesia bagian Timur, provinsi dengan luas wilayah 420.540 kilometer persegi.⁴⁵ Jika dibandingkan dengan wilayah Republik Indonesia, maka luas wilayah provinsi Papua merupakan 19,33 persen dari luas Negara Indonesia yang mencapai 1.890.754 kilometer persegi dan

⁴⁵Lihat *Sekilat tentang Papua* (diakses pada 26 September 2013) dikutip dalam; http://www.papua.go.id/view_detail_page.1/sekilas_papua.html

merupakan provinsi terluas di Indonesia.⁴⁶ Berdasarkan Sensus penduduk tahun 2010 yang dilakukan BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Papua jumlah penduduk Papua sebesar 2.883.881 jiwa yang mencakup penduduk yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 735. 629 jiwa (25,96 persen) dan di daerah perdesaan sebanyak 2.097.752 jiwa (74,04).⁴⁷ Untuk lebih jelas dapat dilihat tabel di bawah ini.

⁴⁶Lihat Sekilas tentang Papua, *ibid.*

⁴⁷Lihat Badan Pusat Statistik Provinsi Papua (diakses pada 26 September 2013) dikutip dalam:
<http://sp2010.bps.go.id/index.php/site?id=9400000000&wilayah=Papua>

Tabel 1: Jumlah Penduduk Papua Tahun 2010⁴⁸

Wilayah Adm.	Papua	Non Papua	Total	Jml. Pddk
Kabupaten Merauke	37731	65347	103078	195716
Kabupaten Jayawijaya	90618	10599	101217	196085
Kabupaten Jayapura	35621	23906	59527	111943
Kabupaten Nabire	32850	36519	69369	129893
Kabupaten Kep Yapen	32815	10150	42965	82951
Kabupaten Biak Numfor	48021	17579	65600	126798
Kabupaten Paniai	77979	2458	80437	153432
Kabupaten Puncak Jaya	53685	1094	54779	101148
Kabupaten Mimika	41388	61639	103027	182001
Kabupaten Boven Digoel	19401	11007	30408	55784
Kabupaten Mappi	37326	5439	42765	81658
Kabupaten Asmat	35592	4628	40220	76577
Kabupaten Yahukimo	85234	1501	86735	164512
Kabupaten Pegunungan Bintang	33422	1883	35305	65434
Kabupaten Tolikara	61120	681	61801	114427
Kabupaten Sarmi	12190	6067	18257	32971
Kabupaten Keerom	10458	16068	26526	48536
Kabupaten Waropen	10707	2430	13137	24639
Kabupaten Supiori	8008	334	8342	15874
Kabupaten Mamberamo Raya	8979	784	9763	18365
Kabupaten Nduga	42721	376	43097	79053
Kabupaten Lanny Jaya	79608	83	79691	148522
Kabupaten Mamberamo Tengah	21213	114	21327	39537
Kabupaten Yalimo	26753	232	26985	50763
Kabupaten Puncak	48885	375	49260	93218
Kabupaten Dogiyai	42051	491	42542	84230
Kabupaten Intan Jaya	20709	36	20745	40490
Kabupaten Deiyai	32087	304	32391	62119
Kota Jayapura	47987	88600	136587	256705

Sumber: Papua.go.id, 2010

⁴⁸Lihat *Jumlah Penduduk Papua* (diakses pada 25 Desember 2013) dikutip dalam: http://www.papua.go.id/view_detail_page/253/Jumlah_Penduduk_Papua_2010.html

Untuk mengetahui jenis kelamin Penduduk provinsi Papua, berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 yang dilakukan BPS, dapat dilihat tabel di bawah ini:

Tabel 2: Jumlah Jenis Kelamin Penduduk Papua⁴⁹

Penduduk	Jumlah	Persentase
Laki-laki	1.505.883 Jiwa	53,15
Perempuan	1.327.489 Jiwa	46,85

Sumber: BPS Papua 2010

Dari data di atas menunjukkan bahwa jumlah laki-laki Papua lebih besar dari pada perempuan yaitu sebanyak 1.505.883 jiwa (53,15) dan Jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.327.489 jiwa (46,85). Dengan jumlah penduduk dan kekayaan alam yang dimiliki Papua, seperti kekayaan keanekaragaman biologi maupun hasil bumi yang berupa barang tambang, gas alam dan sumber mineral lainnya, tetapi masyarakat Papua masih memiliki berbagai tantangan dan permasalahan dalam bidang pembangunan. Pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia (SDM) menjadi permasalahan yang tak kunjung usai, dan yang menjadi tantangan terbesar dalam pembangunan di Papua adalah pemberantasan kemiskinan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Papua dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

⁴⁹ Lihat *Badan Pusat Statistik Provinsi Papua: Jumlah Jenis kelamin Penduduk* (diakses pada 26 September 2013) dikutip dalam:

<http://sp2010.bps.go.id/index.php/site?id=9400000000&wilayah=Papua>

Tabel 3: Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Pulau, September 2012⁵⁰

Pulau	Jumlah Penduduk Miskin (000 orang)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumatera	2 049,64	4 127,54	6 177,18	9,93	12,88	11,72
Jawa	7 119,22	8 703,35	15 822,57	8,67	15,05	11,31
Bali dan Nusa Tenggara	626,02	1 363,55	1 989,57	11,75	16,55	14,66
Kalimantan	254,60	678,33	932,93	4,17	8,18	6,48
Sulawesi	337,09	1 708,50	2 045,59	5,59	14,36	11,41
Maluku dan Papua	121,20	1 505,60	1 626,80	6,11	31,67	24,14
Indonesia	10 507,77	18 086,87	28 594,64	8,60	14,70	11,66

Sumber: Diolah dari data Susenas September 2012.

Dari data di atas terlihat bahwa persentase penduduk miskin terbesar masih berada di pulau Maluku dan Papua, yaitu sebesar 24,14 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan terbesar dalam proses pembangunan di Papua ada pemberantasan kemiskinan bagi masyarakat Papua, terutama penduduk asli Papua yang tinggal di perdesaan. Ada enam faktor utama yang membuat kemiskinan tersebar luas di wilayah Papua, yaitu: 1) Isolasi dan jurang pemisah antar daerah, 2) Rendahnya mutu sumber daya manusia, 3) Rendahnya pendapatan akibat keterbatasan produksi, 4) Hambatan budaya, 5) Rendahnya komitmen politik terhadap pengembangan masyarakat secara berkelanjutan dan 6) Kebijakan dan program yang tidak terintegrasi.⁵¹

⁵⁰Lihat Badan Pusat Statistik provinsi Papua : Profile kemiskinan di Indonesia September 2012 (diakses pada 26 September 2013) dikutip dalam:

http://www.bps.go.id/brs_file/kemiskinan_02jan13.pdf

⁵¹Lihat *Mengungkap Potensi Masyarakat Adat di Papua* (dikases pada 26 September 2013) dikutip dalam: *Warta H.O. Jakarta, Edisi Khusus Program RIFE, Januari 2006*

Bukan hanya kemiskinan yang menjadi kendala pembangunan di Papua, tetapi yang menjadi kendala lain fokus pembangunan di Papua adalah letak geografis wilayah Papua. Wilayah yang memiliki banyak dataran tinggi, hal ini membuat kesulitan dalam pembangunan di bidang infrastruktur, seperti pembangunan jalan dan sarana umum lainnya. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) masyarakat di Papua juga mengalami permasalahan tersendiri. Pembangunan manusia diartikan sebagai “proses memperbesar rentang pilihan masyarakat”. Pembangunan manusia diusulkan untuk pertama kali pada 1990 oleh *United Nation Development Programme* (UNDP) di dalam laporan global *Human Development*.⁵² Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Armatya Sen dan Mahbub ul Huq tentang pembangunan manusia dan tujuan dasar pembangunan manusia:⁵³

Pembangunan manusia, sebagai pendekatan, yang bersangkutan dengan apa yang saya lakukan untuk menjadi ide dasar pembangunan: yaitu, memajukan kekayaan kehidupan manusia, bukan kekayaan ekonomi di mana manusia hidup, yang hanya bagian dari itu.

Menurut Mahbub ul Huq menjelaskan bahwa:

Tujuan dasar dari pembangunan adalah untuk memperbesar pilihan rakyat. Pada prinsipnya, pilihan ini dapat tak terbatas dan dapat berubah dari waktu ke waktu. Orang sering menghargai prestasi yang tidak muncul sama sekali, atau tidak segera, angka pendapatan atau pertumbuhan: akses yang lebih besar terhadap pengetahuan, pelayanan gizi dan kesehatan yang lebih baik, mata pencaharian lebih aman, keamanan terhadap kejahatan dan kekerasan fisik, memuaskan jam rekreasi, politik dan kebebasan budaya dan rasa partisipasi dalam kegiatan masyarakat. Tujuan pembangunan adalah untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi orang untuk menikmati hidup yang panjang, sehat dan kreatif.

⁵²Lihat United Nation Development Programme: About Human Development (diakses pada 25 Desember 2013) dikutip dalam: <http://hdr.undp.org/en/humandev>.

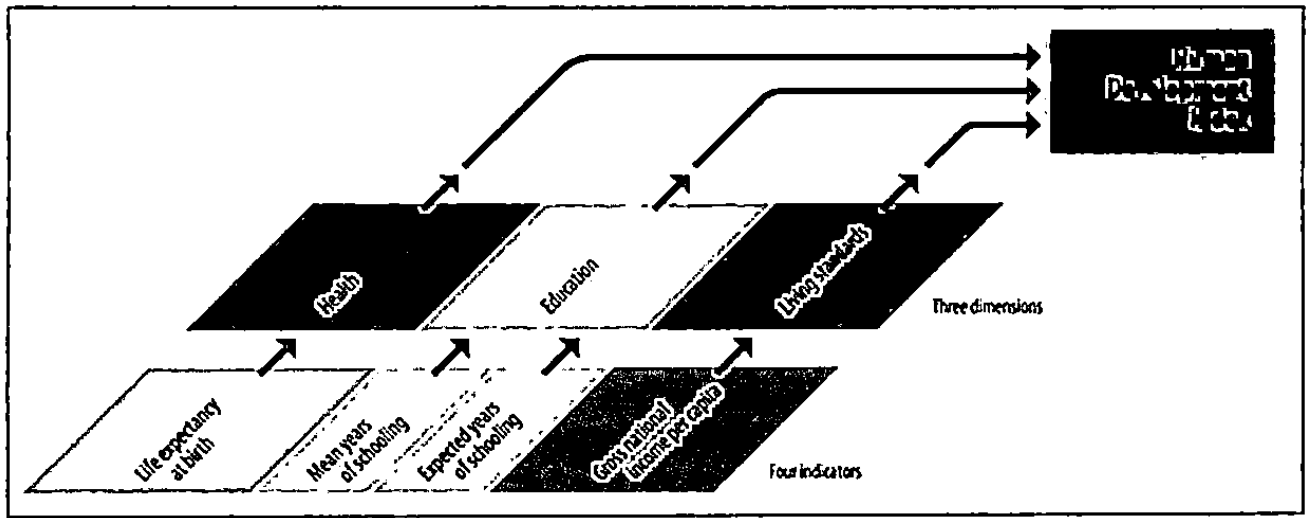
⁵³Lihat United Nation Development Programme: About Human Development (diakses pada 25 Desember 2013) dikutip dalam: <http://hdr.undp.org/en/statistics/hdi/>

Hal ini yang ingin dicapai dalam visi Oxfam, yaitu ingin menciptakan dunia yang adil dan tanpa kemiskinan di Papua. Untuk mengetahui sejauh mana pembangunan sumber daya manusia, *United Nations Development Programme* (UNDP) menggunakan *Human Development Index* (HDI). *Human Development Index* (HDI) adalah sebuah cara yang digunakan untuk mengukur perbandingan sebuah negara berdasarkan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan untuk semua negara yang ada diseluruh dunia.⁵⁴ Untuk lebih jelas tentang komponen *Human Development Index*, dapat tabel dibawah ini:

Tabel 4: Komponen Human Development Index (HDI)

Components of the Human Development Index

The HDI—three dimensions and four indicators



Note: The indicators presented in this figure follow the new methodology, as defined in box 1.2.

Source: HDRO.

54r :... UNDP - Human Development Index (HDI) (diakses pada 18 Desember 2013); dikutip dalam

Dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwa kesehatan, pendidikan dan pendapatan merupakan faktor yang sangat penting untuk mencapai pembangunan di sebuah negara, terutama di negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia. Berbagai permasalahan yang di hadapi Indonesia baik dalam bidang ekonomi, kesehatan maupun permasalahan terhadap pendapatan (*living standards*), kondisi inilah yang mendorong kehadiran NGOs di Indonesia dengan berbagai program kegiatan.

Banyaknya permasalahan yang dihadapi masyarakat Papua dan pemerintah dalam pembangunan, salah satunya disebabkan oleh kebijakan yang dilakukan pemerintah yaitu transmigrasi. Program yang dicanangkan pemerintah dengan tujuan untuk pemerataan penduduk, tetapi turut andil memberikan dampak negatif bagi penduduk asli Papua, terutama kaum perempuan. Masuknya budaya baru melalui program transmigrasi, ini menjadi problematika baru yang dihadapi perempuan khususnya, seperti terasingnya kearifan budaya lokal dan persaingan dengan masyarakat non Papua, sehingga membuat terpinggirnya penduduk asli Papua (*indigenous people*), terutama dalam proses pembangunan.

Salah satu upaya pemerintah dalam pembangunan, yaitu memperlakukan UU No. 21/2001. Undang-Undang tersebut merupakan peraturan tentang menjamin Otonomi Khusus (Otsus) daerah Papua dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. Instruksi Perpresiden (Inpres) ini merupakan rangkaian kebijakan tentang kesepakatan baru dalam pembangunan yang mencakup lima prioritas strategis, sebagai berikut: 1) Meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi kemiskinan, 2)

Meningkatkan mutu pendidikan, 3) Meningkatkan mutu pelayanan dalam bidang

kesehatan, 4) Mengembangkan prasarana dasar untuk meningkatkan akses ke daerah-daerah terpencil dan daerah-daerah di sepanjang garis perbatasan negara, dan 5) Mengambil tindakan tepat yang dapat meningkatkan mutu sumber daya masyarakat adat Papua.⁵⁵ Lima strategi di atas digunakan untuk mendorong kegiatan pembangunan di Provinsi Papua, baik dari tingkat masyarakat maupun pemerintah dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat Papua sendiri. Dengan adanya otonomi khususnya (Otsus) bukan berarti permasalahan yang dihadapi masyarakat selesai, terutama permasalahan keterlibatan kaum perempuan Papua dalam pembangunan.

Untuk mengetahui lebih tentang perempuan dan pembangunan, dalam kajian yang lebih spesifik terkait perempuan dan pembangunan, Julia Claves Mosse di dalam buku *Gender dan Pembangunan* memaparkan adanya evolusi pendekatan yang digunakan terhadap peran perempuan dalam pembangunan. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu, melalui pendekatan *Women in Development (WID)* dan *Women and Development (WAD)*.⁵⁶

Ungkapan Perempuan dalam Pembangunan (WID) lahir pada awal 1970an oleh *Women's Committee of the Washington D.C. Chapter of the Society for International Development*. Pendekatan *Women's in Development (WID)* mencoba ikut mengintegrasikan kepentingan perempuan ke dalam program pembangunan.

⁵⁵Lihat Warta ILO Jakarta, *ibid.*

⁵⁶Lihat Julia Claves Mosse, *Gender dan Pembangunan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal 202

Fokus utama pendekatan WID yaitu terhadap inisiatif, seperti pengembangan teknologi yang lebih tepat, baik, yang akan meringankan beban kerja kaum perempuan. Pendekatan perempuan dalam pembangunan bertujuan untuk benar-benar menekankan sisi produktif kerja dan tenaga kaum perempuan, khususnya penghasil pendapatan dengan mengabaikan sisi reproduktif perempuan.⁵⁷ Dalam hal ini, sebenarnya tujuan pendekatan WID yaitu ingin memperlakukan kaum perempuan yang lebih baik dengan tujuan penghapusan kemiskinan yang menjadi momok yang menakutkan bagi kaum perempuan, karena indikator dari pembangunan sendiri adalah adanya perubahan untuk kesejahteraan.

Selain pendekatan WID, kaum modernis juga melakukan pendekatan *Women and Development* (WAD). Istilah pendekatan WAD merupakan satu pendekatan feminis neo-Marxis, yang muncul dalam paruh terakhir 1970an yang berasal dari suatu kepedulian terhadap keterbatasan teori modernisasi. Pendekatan WAD menunjukkan bahwa perempuan selalu penting secara ekonomi, dan kerja yang dilakukannya dalam rumah tangga dan komunitasnya sangat mendasar untuk mempertahankan masyarakat mereka. Dalam pendekatan *Women and Development*, posisi perempuan dilihat sebagai bagian dari struktur internasional dan ketidakadilan kelas, ketimbang sebagai akibat dari ideologi dan struktur patriarki.⁵⁸ Dalam hal ini, pendekatan perempuan dan pembangunan (WAD) menekankan bahwa struktur

pembangunan. Bukan hanya kaum perempuan, tetapi pendekatan ini menjelaskan bahwa kaum laki-laki pun bisa juga menjadi korban dari proses pembangunan.

Dua pendekatan pembangunan di atas memberikan gambaran mendasar bahwa dalam setiap proses pembangunan, seharusnya perempuan memiliki partisipasi dan peran yang sama dengan laki-laki, baik dalam pembangunan maupun terhadap pembangunan. Dalam kenyataannya, masih ada kesenjangan dan perbedaan yang dirasakan oleh kaum perempuan dalam pembangunan, baik sebagai warga negara maupun masyarakat yang dikenal dengan disparitas gender. Gender merupakan seperangkat peran, fungsi, tanggung jawab, harapan dan karakteristik feminitas dan maskulinitas antara laki-laki dan perempuan yang merupakan hasil dari konstruksi sosial.⁵⁹ Perbedaan peran inilah yang kerap terjadi terhadap masyarakat Papua, yaitu perbedaan terhadap kesempatan dan peran yang dilakukan laki-laki dan perempuan Papua di dalam pembangunan.

B. Peran Perempuan dan Disparitas Gender di Papua

Ketika berbicara tentang perempuan dan pembangunan, berarti berbicara tentang peran dan harapan apa yang dilakukan oleh kaum perempuan dalam proses pembangunan. Dengan kata lain berbicara tentang apa yang dapat dilakukan dengan status dan kedudukan kaum perempuan dalam pembangunan. Dalam Konstitusi, Pasal 28 I (2) UUD 1945 menyatakan bahwa, "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan*

perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."⁶⁰ Hal ini berarti bahwa, pemerintahan Indonesia menjamin dan melindungi tiap warga negaranya dari sikap atau tindakan diskriminatif tanpa membedakan agama, status sosial, ras, suku, budaya, maupun jenis kelamin. kenyataannya masih banyak diskriminasi yang dirasakan oleh perempuan, terutama perempuan Papua, baik dalam kesehatan, pendidikan, partisipasi dalam politik maupun diskriminasi terhadap perempuan dalam adat dan budaya serta partisipasi dalam pembangunan, yang mengakibatkan pembiasaan kekerasan terhadap pembangunan.

Sebelum membahas lebih lanjut permasalahan yang di hadapi masyarakat Papua, terutama kaum perempuan terhadap gender. Adapun nilai / ideologi yang ingin dicapai kaum perempuan terhadap gender yaitu *Feminisme*. *Feminisme* sebagai gerakan awalnya berangkat dari asumsi bahwa kaum perempuan pada dasarnya tertindas dan dieksploitasi, serta usaha untuk mengakhiri penindasan dan eksploitasi tersebut. *Feminisme* merupakan perjuangan dalam rangka mentransformasikan sistem dan struktur yang tidak adil, menuju ke sistem yang adil bagi perempuan maupun laki-laki.⁶¹ Hal ini lah yang ingin dilakukan Oxfam sebagai NGOs untuk membantu masyarakat Papua, terutama kaum perempuan Papua, yaitu adanya keadilan terhadap kaum perempuan dan bebas dari kemiskinan.

⁶⁰Lihat *Hak Asasi Manusia Pasal 28 I ayat 2* (diakses pada 26 September 2013) dikutip dalam: Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tahun 2000.

⁶¹Lihat Monevur Eklah, *Analisis gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

Dalam rangka memperjuangkan gerakan *feminisme*, Harding dan Siva di dalam buku Masour fakih: *Analisa Gender dan Transformasi Sosial* membahas tentang dialektika dua prinsip ideologi antara *Feminitas* dan *Maskulinitas*. *Feminitas* dan *Maskulinitas* adalah dua ideologi yang berbeda dan kontradiktif. *Feminitas* adalah ideologi yang berciri kedamaian, keselamatan, kasih sayang dan kebersamaan. Sementara *maskulinitas* memiliki karakter persaingan, dominasi, eksploitasi dan penindasan.⁶² Untuk memahami ideologi gender lebih lanjut, perhatikan tabel di bawah ini:⁶³

Tabel 5: Ideologi Gender

	Keterangan	Contoh
Sex	Sex merujuk pada peredaan biologis, Kromoson, Profile Hormonal, Organ internal dan eksternal.	<ul style="list-style-type: none"> • Perempuan dapat menstruasi, laki-laki tidak. • Laki-laki mempunyai testicles, perempuan tidak . • Perempuan mempunyai payudara yang pada umumnya membesar dan dapat digunakan untuk menyusui
Gender	<p>Gender "merujuk pada peran sosial dibangun, perilaku, kegiatan, dan atribut bahwa suatu masyarakat tertentu dianggap tepat untuk pria dan wanita.</p> <p>Maskulin dan feminin</p> <p>Jenis Kelamin menggambarkan karakteristik bahwa masyarakat atau budaya melukiskan sebagai maskulin atau feminin</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Laki-laki bertugas untuk mencari nafkah, sementara perempuan bertugas mengurus rumah tangga • Di Arab Saudi, perempuan tidak diijinkan untuk mengemudi

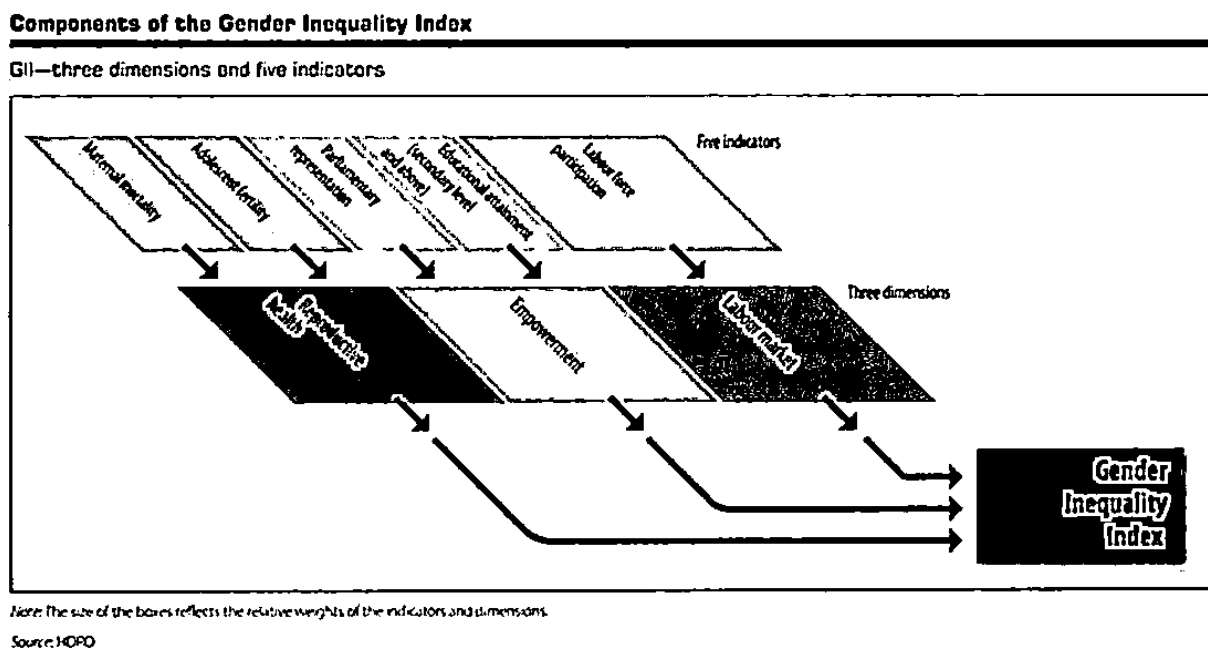
Sumber: Semiloka "Strategi Menerapkan Pemahaman Gender Melalui Sudut Pandang Budaya".Diselenggarakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, 5-7 Desember 2013.

⁶²Lihat Mansour Fakih, *Analisi gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996),hal. 104 – 105.

⁶³ Lihat Nur Azizah, *Menata Stategi Politik yang Ramah Gender (Perspektif Budaya Politik)* dalam Semiloka "Strategi Menerapkan Pemahaman Gender Melalui Sudut Pandang Budaya" (Yogyakarta, 5-7

Kondisi *feminitas* dan *maskulinitas*lah yang menjadi problematika antara laki-laki dan perempuan di Papua, sehingga menimbulkan adanya ketidaksetaraan yang dimiliki di dalam masyarakat, terutama di dalam pembagian peran. Untuk mengetahui ukuran yang digunakan dalam mengukur ketidaksetaraan, *United Nation Development Programme* (UNDP) sebagai lembaga internasional memperkenalkan ukuran dari ketidaksetaraan yang memiliki *framework* yang sama dengan *Human Development Index* (HDI) dan *Inequality-adjusted Human Development Index* (IHDI), yaitu untuk lebih mengekspos perbedaan dalam distribusi prestasi antara laki-laki dan perempuan. Untuk mengetahui komponen dari Gender Inequality Index (GII) dapat di lihat tabel di bawah ini.⁶⁴

Tabel 6: Komponen Gender Inequality Index (GII)



Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan upah tenaga kerja (*labour market*) menjadi komponen yang dapat menimbulkan terjadi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam pembangunan. Permasalahan ini menempatkan kaum perempuan Papua pada posisi yang paling sedikit mendapatkan peran hampir di segala lini dalam tatanan masyarakat. Bukan hanya itu, tetapi banyak persoalan yang terjadi di Papua membuat kaum perempuan semakin termarginalkan seperti:

1. Perempuan Papua dan Kekerasan

Kedudukan perempuan sebagai objek milik laki-laki di dalam kultur masyarakat Papua menjadikannya rentan sebagai korban kekerasan, baik di ruang privat sekaligus ruang publik. Rentannya kekerasan yang dialami oleh perempuan Papua salah satunya disebabkan oleh konflik yang masih terjadi di dalam masyarakat Papua. Sebagaimana pergusuran yang dialami oleh warga Mulkini untuk membangun pemukiman para pekerja PT. Freeport pada tahun 1973,⁶⁵ merupakan salah satu bentuk permasalahan yang dialami masyarakat Papua. Kondisi pergusuran yang terjadi berdampak pada hilangnya mata pencarian para penduduk Papua dan pengungsian. Pasang surut konflik yang terjadi di Tanah Papua berdampak langsung pada semua anggota masyarakat Papua, tidak terkecuali kaum perempuan.

⁶⁵Lihat Benny Giay dan Yafet Kambai, Yosepha Alomang: *Pergulatan Seorang Perempuan Papua Melalui Perindasan (Jawa Barat, Papua, Perindasan Nani, 1992)*, 1-14.

Bukannya pergusuran, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menjadi problema sehari-hari yang dihadapi perempuan Papua. Bentuk kerentanan perempuan dalam rumah tangga seperti: tindakan pemerkosaan dalam rumah tangga, penganiayaan, poligami dan selingkuh yang dilakukan oleh suami serta salah satu dampak yang paling fatal dialami oleh korban KDRT adalah HIV/AIDS. Dari kondisi KDRT yang terjadi tersebut, penganiayaan merupakan bentuk kekerasan yang paling tinggi dialami oleh perempuan Papua, dengan persentase 70,3persen.⁶⁶ Survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2006 tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan, menemukan bahwa jumlah kekerasan terhadap perempuan di Papua adalah yang tertinggi di Indonesia. Menurut survei tersebut, kekerasan di Papua mencapai 13,6 persen dari kasus-kasus yang dilaporkan secara nasional.

Tidak hanya rentan sebagai korban KDRT suami maupun lingkungan domestik, perempuan Papua juga menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh negara. Kekerasan negara adalah semua bentuk kekerasan terhadap perempuan berupa kekerasan fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau didukung oleh aparat negara, keamanan dan aparat pemerintah.⁶⁷ Seringnya bentuk kekerasan yang diterima perempuan Papua, hal ini menimbulkan trauma yang mendalam bagi kaum perempuan. Bukan hanya itu, akibat kekerasan yang terjadi banyak kaum perempuan

⁶⁶Lihat Hasil kerjasama Komnas Perempuan, Pokja Perempuan Majelis Rakyat Papua dan Internasional Center for Transitional Justice (ICTJ) Indonesia serta didukung oleh HIVOS dan Swiss Embassy dalam Pendokumentasian Bersama Kelompok Kerja Pendokumentasian Kekerasan dan Pelanggaran HAM Perempuan Papua, 2009-2010, Stop Sudah! : *Kesaksian Perempuan Papua Korban Kekerasan dan Pelanggaran HAM 1963-2009*, hal 45.

⁶⁷Lihat Hasil Pendokumentasian Bersama Kelompok Kerja Pendokumentasian Kekerasan dan

menjadi terkucil dan terasing di dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Berdasarkan hasil pendokumentasi yang dilakukan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Pokja Perempuan Majelis Rakyat Papua dan *Internasional Center for Transitional Justice* (ICTJ) Indonesia serta didukung oleh *HIVOS* dan *Swiss Embassy* pada November 2009 Tim dokumentasi menemukan 138 korban kekerasan negara.

Ringkasan temuan tentang kekerasan negara terhadap perempuan tertuang dalam tabel di bawah ini.⁶⁸

⁶⁸ Lihat Hasil Pendokumentasi Bersama Kelompok Kerja Pendokumentasi Kekerasan

**Tabel 7: Kekerasan Negara Terhadap Perempuan di Papua
November 2009**

Jenis pelanggaran	Pelaku Pelanggaran				Jumlah Pelanggaran
	Militer	Polisi	Gabungan (Militer-Polisi)	Aparat Negara lainnya	
Pembunuhan/penghilangan	3	4	1		8
Penembakan / percobaan pembunuhan	4	1			5
Penahanan sewenang-wenang	10	4	3	1	18
Penganiayaan	18	3			21
Penyiksaan	4	4	1		9
Penyiksaan Seksual	4	1	1		6
Pemeriksaan	51	1			52
Percobaan perkosaan	2				2
Perbudakan seksual	5				5
Eksplorasi seksual	9				9
KB dan aborsi paksa		1		4	5
Pengungsian / kelaparan	23	1			24

Sumber: Hasil Pendokumentasian Bersama Kelompok Kerja Pendokumentasian Kekerasan dan Pelanggaran HAM Perempuan Papua, 2009-2010

*Catatan: Angka ini merupakan hasil dari penghitungan manual.

Laporan UNESCO menunjukkan, bahwa anak-anak asli Papua baik i maupun perempuan sering ditemukan pada posisi yang dirugikan, yaitu n bahwa anak-anak asli Papua umumnya kurang terwakili di dalam pencap program pendidikan untuk semua.⁶⁹ Untuk mengetahui partisipasi anak-an tingkat Sekolah Dasar (SD), dapat dilihat tabel di bawah ini:

Tabel 8: Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Indonesia E Tingkat Sekolah Dasar Tahun 2009/2010⁷⁰

Provinsi	Laki-Laki			Per	
	Negeri	Swasta	Persentase	Negeri	Sw
Maluku	92,898	40,196	50,77	91,150	37
Maluku Utara	74,046	12,481	50,93	72,385	10
Bali	198,637	15,056	50,84	192,211	14
NTB	280,675	4,062	50,09	279,735	3.
NTT	238,068	161,685	50,18	236,597	16
Papua	103,840	65,449	51,97	100,067	50
Papua Barat	45,413	17,550	51,11	43,603	10

Sumber: Kementerian Pendidikan Nasional 2009/2010

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Pendidil pada tahun 2009/2010 pada tingkat Sekolah Dasar (SD), Papua merup yang memiliki tingkat partisipasi dan kesenjangan yang cukup tinggi a dan perempuan dalam bidang pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD).

⁶⁹Lihat *Organisasi Buruh Internasional* (diakses pada 26 September 2013) dikutip dal EAST-Penciptaan Lapangan Kerja Kaum Muda Melalui Pendidikan dan Pelatihan Ke Ikhtisar Kebijakan singakat-Juli 2011

⁷⁰Lihat *Statistik Sekolah Dasar* (diakses pada 27 September 2013) dikutip dalam: 0010/index.pdf 001

jumlah persentase anak laki-laki yang bersekolah di sekolah negeri dan swasta sebesar 51,97 persen dan anak perempuan 48,03 persen untuk wilayah Papua. Sedangkan untuk kawasan Papua Barat anak laki-laki yang bersekolah di sekolah negeri dan swasta memiliki persentase sebesar 51,11 persen dan anak perempuan sebanyak 48,89 persen. Ini menunjukkan, bahwa Indonesia bagian Timur merupakan wilayah yang memiliki kesenjangan dan kurangnya partisipasi anak perempuan di tingkat Sekolah Dasar (SD), terutama anak perempuan yang berdomisili di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Bukan hanya tingkat Sekolah Dasar (SD), untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), wilayah Indonesia Bagian Timur juga memiliki kesenjangan dan kurangnya partisipasi perempuan dalam menempuh pendidikan. Kesenjangan yang

Tabel 9: Jumlah Siswa Menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah Indonesia Bagian Timur Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Tahun 2009/2010⁷¹

Provinsi	Laki-Laki			Perempuan		
	Negeri	Swasta	Jumlah	Negeri	Swasta	Jumlah
Maluku	19,224	8,281	27,505	20,567	7,988	28,55
Maluku Utara	9,611	4,728	14,339	9,417	3,858	13,275
Bali	27,013	13,507	40,520	25,290	10,960	36,250
NTB	34,931	10,361	45,292	37,145	9,619	46,764
NTT	28,328	22,319	50,647	31,350	23,224	54,574
Papua	12,496	8,523	21,019	12,936	7,259	20,195
Papua Barat	7,341	2,546	9,887	6,333	2,445	8,778

Sumber: kementerian Pendidikan Nasional 2009/2010

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2009/2010 pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), tabel di atas menunjukkan jumlah partisipasi laki-laki sebanyak 21,019 jiwa untuk sekolah negeri dan swasta serta perempuan sebanyak 20,195 jiwa untuk sekolah negeri dan swasta di kawasan Papua. Sedangkan untuk kawasan Papua Barat laki-laki sebanyak 9,887 jiwa untuk tingkat sekolah negeri dan swasta serta untuk sekolah negeri dan swasta partisipasi kaum perempuan sebanyak 8,778 jiwa.

Dari dua tabel di atas, menunjukkan bahwa masih minimnya keterlibatan dan partisipasi kaum perempuan Papua dalam pendidikan di dibandingkan dengan laki-laki. Kesenjangan yang terjadi di sebabkan oleh faktor internal yaitu faktor ekonomi

⁷¹Lihat *Statistik Sekolah Menengah Atas* (diakses pada 27 September 2013) dikutip dalam: http://www.nsp.kemdiknas.go.id/uploads/Statistik%20Pendidikan/0910/index_sma_0910.pdf

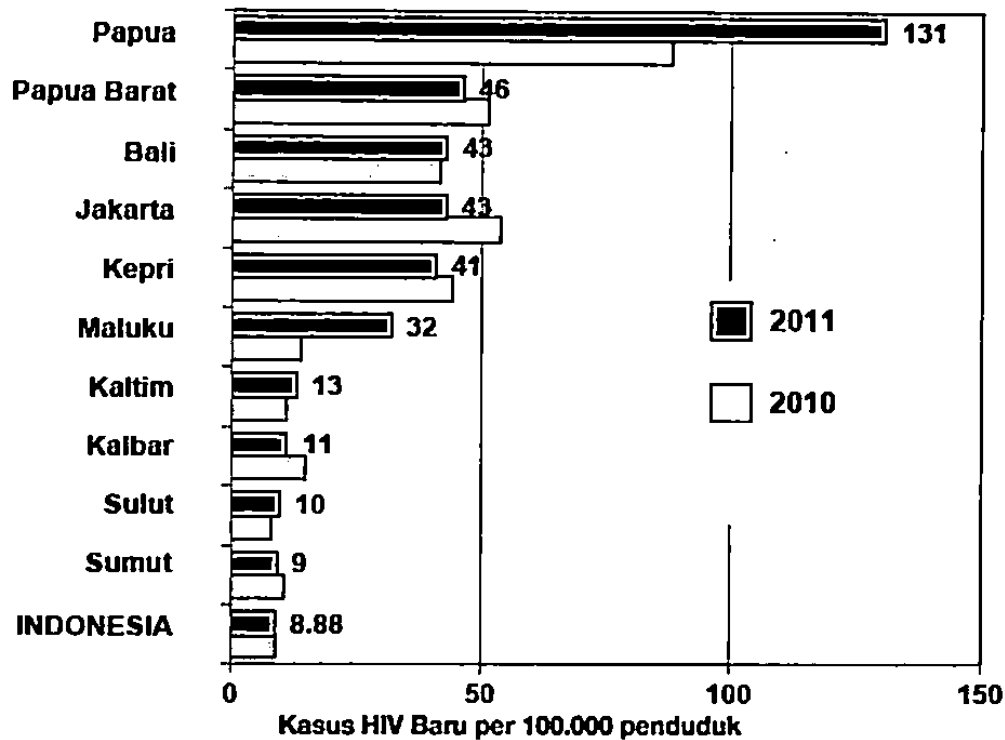
(kemiskinan), sehingga menjadi beban berat untuk keluarga dan kaum perempuan sendiri serta luasnya wilayah Papua membuat jarak antara satu pemukiman dengan pemukiman yang lainnya menjadi sangat berjauhan

3. Perempuan Papua dan Kesehatan.

Kesehatan ibu dan anak merupakan salah satu program khusus pemerintah dalam membangun Papua di bidang kesehatan. Salah satu indikator sebuah wilayah dikatakan maju dan sejahtera adalah terciptanya kesehatan masyarakat yang baik. Bagi masyarakat Papua, untuk mendapatkan kesehatan yang baik merupakan kesempatan langka. Kurangnya akses untuk mendapatkan kesehatan yang baik menjadi permasalahan yang selalu di hadapi perempuan Papua, kondisi ini terjadi dikarenakan masih banyak warga Papua yang tinggal di dalam hutan serta sistem hidup yang masih berpindah-pindah. Kendala lain yang dihadapi perempuan Papua yaitu, kemiskinan dan ketidaktahuan kaum perempuan akan kesehatan, hal ini disebabkan sebagian besar waktu perempuan dihabiskan untuk berkebun guna memenuhi kebutuhan dan mengurus rumah tangga.

HIV/AIDS, gizi buruk, serta tingginya tingkat kematian ibu dan anak, inilah kondisi yang harus dihadapi kaum perempuan setiap harinya. Dari permasalahan yang ada, yang mendapatkan perhatian besar perempuan di Papua adalah rentannya tertular virus HIV/AIDS. Untuk mengetahui provinsi yang memiliki kasus HIV/AIDS tertinggi dapat dilihat tabel di bawah ini:

Tabel 10: Sepuluh Provinsi teratas kasus HIV baru per 100.000 penduduk tahun 2010⁷²



Dihitung dari: Kasus HIV Baru dari Kementerian Kesehatan, Laporan Perkembangan Situasi HIV & AIDS di Indonesia sampai Desember 2011. Data Penduduk dari Proyeksi SUPAS (Survei Antarsensus) 2005 untuk penduduk 2011, sensus 2010 untuk penduduk 2010 (proyeksi 2011 tidak tersedia pada saat laporan ini)

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa Papua merupakan Provinsi yang memiliki tingkat kasus HIV/AIDS yang sangat tinggi di dibandingkan dengan provinsi lainnya. Data Dinas Kesehatan Provinsi Papua per Maret 2009 menunjukkan, jumlah penderita HIV/AIDS di Provinsi Papua sebanyak 4.745 orang.⁷³ Laporan data

⁷²Lihat Ringkasan kajian UNICEF Indonesia Oktober 2012: Respons terhadap HIV dan AIDS (diakses pada tanggal 27 september 2013), dikutip dalam:

http://www.unicef.org/indonesia/id/A5B_Ringkasan_kajian_Kesehatan_REV.pdf

⁷³Lihat Hasil kerjasama Komnas Perempuan, Pokja Perempuan Majelis Rakyat Papua dan Internasional Center for Transitional Justice (ICTJ) Indonesia serta didukung oleh HIVOS dan Swiss Embassy dalam Pendokumentasian Bersama Kelompok Kerja Pendokumentasian Kekerasan dan Pelanggaran HAM Perempuan Papua, 2009-2010. Stop Siskel: Kesehatan Perempuan Papua Korban

kasus HIV dan AIDS yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Provinsi Papua per 30 September 2012 mencapai 13.196 kasus. Sebanyak 5.413 kasus HIV dan 7.882 kasus AIDS, sedangkan jumlah 1.070 orang diantaranya sudah meninggal dunia. Sampai akhir tahun Oktober 2012, dari jumlah kasus dilaporkan, sebanyak 3.727 pasien HIV dan AIDS yang pernah mendapat pengobatan *anti retroviral (ARV)*.⁷⁴ Dalam kasus ini, perempuanlah yang sangat rentan tertular HIV/AIDS, kondisi ini disebabkan oleh tindakan kekerasan, seperti pemerkosaan dan dari pasangannya (suami).

4. Perempuan Papua dan Politik

Isu gender menjadi hal yang selalu diperdebatkan, terutama dalam bidang politik. Bagi kaum perempuan Papua, dapat ikut berpartisipasi masih merupakan hal yang sangat tabu dan sulit. Meskipun perempuan Papua memberikan sumbangan yang besar dalam meningkatkan taraf hidup keluarga, tetapi kaum perempuan masih tidak dilibatkan dalam berbagai struktur dan pengambilan keputusan di dalam masyarakat. Hal ini disebabkan masyarakat Papua pada umumnya menetapkan karakteristik laki-laki dan perempuan berdasarkan nilai-nilai yang dianut, termasuk di dalamnya adalah peran apa yang harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan di dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk struktur ini di dalam studi perempuan ini disebut sistem Patriarkhi. Dalam pengertian luas Patriarkhi merupakan:

⁷⁴Lihat HIV dan AIDS Provinsi Papua per 30 September capai 13.196 kasus (diakses pada 27

“manifestasi dan insitusal dominasi laki-laki terhadap perempuan dan anak-anak di dalam keluarga dan perluasan dominasi laki-laki terhadap perempuan di masyarakat secara umum.” (Lerner 1986:239).⁷⁵

Dominasi inilah yang terjadi di dalam masyarakat Papua, yaitu dominasi akan peran antara laki-laki dan perempuan.

Dalam undang-undang dasar 1945, pasal 28E ayat 3 yang menyatakan *“setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”*,⁷⁶ dengan demikian Undang-Undang 1945 secara tegas memberikan jaminan bagi setiap warganya. Namun, kondisi itu masih sangat sulit didapatkan perempuan Papua, hal ini terlihat hingga kini peran dan posisi kaum perempuan di Papua dalam masyarakat dan ranah politik masih sangat minim. Bukan hanya di ruang privat (keluarga), tetapi perempuan Papua tidak diperkenankan untuk masuk dan berpartisipasi ke dalam ruang pengambilan kebijakan dan keputusan adat untuk masyarakat. Sebagai contoh, perempuan Asmat dilarang untuk mengikuti pertemuan dengan laki-laki di rumah *Yeuw* (rumah adat Asmat). Terdapat batasan bagi perempuan untuk memasuki rumah *Yeuw* sampai di tangga atau pintu untuk membawa perlengkapan dan konsumsi saja. Hanya laki-laki saja yang berhak memasuki rumah *Yeuw* dan beraktivitas di

⁷⁵Lihat Loekman Soetrisno, *Kemiskinan: Perempuan dan Pemberdayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 1997), hal. 36.

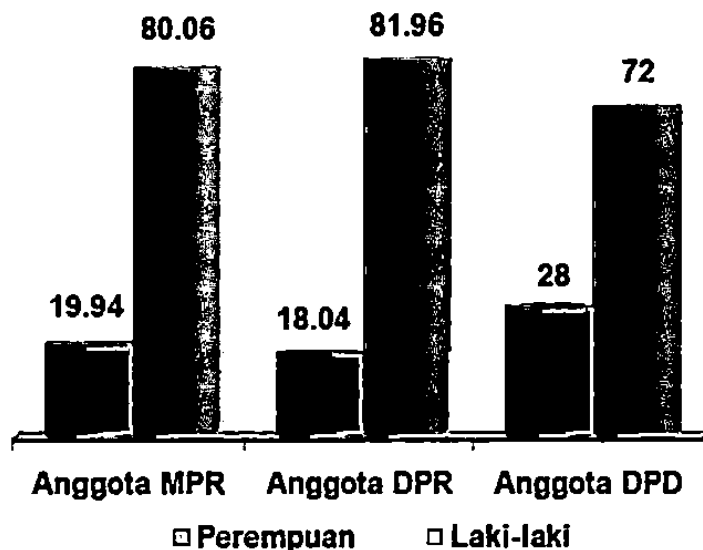
⁷⁶Lihat Hak Asasi Manusia Pasal 28 E ayat 3 (diakses pada 28 September 2013) dikutip dalam;

dalamnya. Tidak hanya terjadi dalam musyawarah adat saja, tetapi juga ketika perayaan pesta adat berlangsung.⁷⁷

Fakta lain yang di hadapi perempuan, yaitu masih ada keterbatasan yang dimiliki kaum perempuan dalam berpartisipasi dalam partai politik ataupun parlemen. Untuk mengetahui partisipasi perempuan dalam politik dapat dilihat tabel di bawah ini:

Tabel 11: Persentase Lembaga Legislatif⁷⁸

**Persentase Anggota MPR, DPR, dan DPD menurut Jenis Kelamin
Periode 2009-2014 per 16 Juli 2012**



Sumber: MPR-RI

⁷⁷Lihat Aisah Putri Budiarti, Representasi Perempuan dalam Pusaran Politik Papua dalam Perempuan, Partai Politik dan Parlemen: Studi Kinerja Anggota Legislatif Perempuan di Tingkat Lokal (Jakarta: PT. Gading Inti Prima (anggota IKAPI), 2012), hal 179.

⁷⁸Lihat Ulasan Stat. Gender 2012- Kementerian Pemberdayaan Perempuan (diakses pada 28 September 2012), dikutip dalam: <http://www.menegpp.go.id/v2/index.php/daftar-buku/perempuan-dan-laki-laki-di-indonesia-2012?download=514%3Aperempuan-dan-laki-laki-di-indonesia-2012>

Dari data di atas dapat kita lihat persentase berdasarkan Jenis kelamin di lembaga legislatif, yaitu anggota MPR perempuan sebesar 19,94 % dan laki-laki sebesar 80,06 %, untuk anggota DPR perempuan sebanyak 18,04% dan laki-laki 81,96 % serta Anggota DPD perempuan sebanyak 28 % dan laki-laki sebesar 72 %.

Bukan hanya di lembaga legislatif, tetapi perempuan juga memiliki partisipasi yang sangat sedikit di lembaga eksekutif, hal ini terlihat.⁷⁹

1. Dari 34 kementerian di kabinet Indonesia Bersatu 2009-2014 jilid II, hanya 4 kementeraian yang di pimpin oleh menteri perempuan, yaitu: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pariwisata dan ekonomi kreatif, Kementerian Perencanaan pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementeraian Kesehatan.
2. Dari 33 provinsi di Indonesia, hanya ada 1 provinsi yang di pimpin oleh perempuan, yaitu provinsi Banten yang terpilih sejak 2007 dan terpilih lagi pada tahun 2012.
3. Dari 497 Kabupaten/kota di Indonesia, hanya 16 Walikota dan Bupati perempuan.

Bukan hanya di tingkat Pusat, untuk tingkat provinsi pun keterwakilan perempuan masih minim, Papua salah satunya. Untuk wilayah Papua sendiri keterwakilan kaum perempuan pun masih sangat minim. Hal ini dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

⁷⁹ Lihat Ulasan Stat. Gender 2012, Kementerian Pemberdayaan Perempuan, ibid.

Tabel 12: Keterwakilan Perempuan di Tingkat DPRD Provinsi⁸⁰

No.	Provinsi	Jumlah Anggota Perempuan		Jumlah Anggota Laki-laki		Total 100%
1.	Aceh	4	5,80%	65	94,20%	69
2.	Sumatera Utara	20	20,00%	80	80,00%	100
3.	Sumatera Barat	7	12,73%	48	87,27%	55
4.	Riau	7	12,73%	48	87,27%	55
5.	Jambi	4	8,89%	41	91,11%	45
6.	Sumatera Selatan	8	10,67%	67	89,33%	75
7.	Benkulu	7	15,56%	38	84,44%	45
8.	Lampung	12	16,00%	63	84,00%	75
9.	Bangka Belitung	3	6,67%	42	93,33%	45
10.	Kepulauan Riau	7	15,56%	38	84,44%	45
11.	DKI Jakarta	20	21,28%	74	78,72%	94
12.	Jawa Barat	26	26,00%	74	74,00%	100
13.	Jawa Tengah	18	18,00%	82	82,00%	100
14.	DI Yogyakarta	11	20,0%	44	80,00%	55
15.	Jawa Timur	19	19,00%	81	81,00%	100
16.	Banten	16	18,82%	69	81,18%	85
17.	Bali	4	7,27%	51	92,73%	55
18.	Nusa Tenggara Barat	3	5,45%	52	94,55%	55
19.	Nusa Tenggara Timur	4	7,27%	51	92,73%	55
20.	Maluku	8	17,78%	37	82,22%	45
21.	Maluku Utara	3	6,67%	42	93,33%	45
22.	Sulawesi Utara	9	20,00%	36	80,00%	45
23.	Sulawesi Barat	5	11,11%	40	88,89%	45
24.	Sulawesi Tengah	9	20,00%	36	80,00%	45
25.	Sulawesi Tenggara	2	4,44%	43	95,56%	45
26.	Sulawesi Selatan	9	12,00%	66	88,00%	75
27.	Gorontalo	7	15,56%	38	84,44%	45
28.	Kalimantan Timur	9	16,36%	46	83,64%	55
29.	Kalimantan Tengah	7	15,56%	38	84,44%	45
30.	Kalimantan Selatan	7	12,73%	48	87,27%	55
31.	Kalimantan Barat	4	7,27%	51	92,73%	55
32.	Papua	4	7,14%	52	92,86%	56
33.	Papua Barat	5	11,36%	39	88,64%	44
Total		288		1520		2.008

Sumber: "Rekapitulasi Anggota DPRD Provinsi Seluruh Indonesia Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Pemilu Tahun 2009" Divisi Teknis & Humas KPU.

⁸⁰Lihat UNDP: *Partisipasi Perempuan dalam bidang Politik dan Pemerintahan* (diakses pada 28 September 2013) dikutip dalam:

Dari tabel diatas, dapat di lihat bahwa keterwakilan perempuan Papua di DPRD provinsi juga tidak terwakili dengan baik. Dari Jumlah provinsi Jawa Barat memiliki keterwakilan kaum perempuan tertinggi yaitu sebesar 26,00 persen. Untuk wilayah Papua sendiri hanya menyentuh angka 7,14 persen dan sebanyak 92,86 persen anggotanya didominasi kaum laki-laki.

Untuk mengetahui sejauh mana persentasi kaum perempuan Papua, Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Papua tahun 2012, komposisi penduduk laki-laki sebanyak 1.505.883 jiwa dengan persentase sebanyak 54 persen, sedangkan komposisi penduduk perempuan sebanyak 1.327.498 jiwa, dengan persentase sebanyak 46 persen.⁸¹ Dari data tersebut, dapat kita lihat bahwa jumlah penduduk perempuan Papua hampir sebanding dengan jumlah penduduk laki-laki yaitu kaum laki-laki 54 persen dan perempuan sebesar 46 persen. Dengan jumlah persentase yang hampir seimbang, bukan berarti kaum perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam bidang politik, akan tetapi kaum laki-laki lebih mendominasi.

Lebih lanjut partisipasi perempuan dalam politik dan hak pilih yang digunakan oleh perempuan Papua, dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

⁸¹ Lihat Aisah, Dasi, D. K. (2012). *Perempuan dan Politik: Perempuan dan Politik*. Jakarta: Kencana.

Tabel 13: Jumlah Pemilih yang Menggunakan Hak Pilih dan Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilu 2009⁸²

	Laki-Laki	Perempuan
Jumlah Pemilih DPT dan tambahan dalam Pemilu Legislatif DPRD	1.102.734	960.906
Jumlah Pemilih Pemilu Legislatif DPRD yang menggunakan hak Pilih	978.987	848.724
Jumlah Pemilih Pemilu Legislatif DPRD yang tidak menggunakan hak pilih	104.293	90.523

Sumber: KPU Provinsi Papua 2012

Jika mengacu pada tabel di atas terhadap jumlah perempuan di Papua dan pemilih yang menggunakan hak pilih. Maka, kaum perempuan memiliki potensi besar untuk menjadi anggota dewan. Ini terlihat dengan jumlah penduduk perempuan yang menggunakan hak pilih untuk tingkat DPRD sebanyak 960.906 perempuan untuk tingkat pemilih DPT partisipasi perempuan sebanyak 848.724. Dengan begitu, calon legislatif di Papua khususnya kaum perempuan akan lebih dan mendapatkan porsi lebih dari 7,14 persen. Tingginya partisipasi perempuan dalam politik, akan tetapi peran dan representatif kaum perempuan Papua di kancah politik masih sangat rendah, ini disebabkan oleh banyaknya hambatan dihadapi kaum perempuan. Hambatan tersebut berasal dari anggota

masyarakat bahkan diri perempuan itu sendiri, serta kendala yang paling besar berasal dari kultur (adat) dan beban ganda yang harus dipikul oleh kaum perempuan Papua.⁸³

Dari hambatan kultur, yaitu berupa sistem norma dan nilai dari patriarkhi yang selalu dipegang teguh oleh perempuan Papua, seperti sulitnya izin dari anggota keluarga dan suami. Maka, dengan ini perempuan Papua dihadapkan dengan ketimpangan akan peran dan kedudukannya di dalam masyarakat. Secara garis besar, nilai kultur dan agama yang diyakini oleh masyarakat Papua cenderung sangat merugikan posisi dan peran kaum perempuan dalam masyarakat. Meskipun kedua hal tersebut melemahkan posisi dan peran kaum perempuan, namun terdapat nilai pembeda diantara keduanya, yaitu kultur menempatkan kaum perempuan sebagai objek bagi kaum laki-laki, sementara agama lebih menempatkan perempuan sebagai penopang posisi laki-laki. Beban ganda yang menjadi tanggung jawab perempuan Papua adalah sulitnya kaum perempuan dalam pembagian waktu, yaitu kaum perempuan Papua biasanya lebih banyak menghabiskan waktu di ruang privat (keluarga), sehingga mempunyai kendala untuk beraktivitas di ruang publik, akibatnya perempuan menjadi semakin tersisih dan enggan terlibat dalam politik.

Berbagai permasalahan yang dihadapi kaum perempuan Papua, kondisi ini membuat perempuan Papua semakin termajinal dan membuat disparitas antara laki-laki dan perempuan semakin besar. Untuk mereduksi permasalahan yang terjadi

⁸³ Lihat Aisah Putri Budiarti, dalam Representasi Perempuan dalam Pucaran Politik Papua, *ibid* hal

terhadap perempuan Papua, maka diperlukan dorongan dan bantuan dari pihak luar (eksternal). Keterlibatan NGOs di Papua yaitu untuk memberikan dukungan dan pemberdayaan kepada masyarakat, khususnya perempuan. Tujuan pemberdayaan agar perempuan Papua mendapatkan porsi yang sama, baik dalam pendidikan, kesehatan maupun kemartirianasi dalam ke... ..